

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Davis, Gordon B. dan Margrethe H. 1985. *Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development*. Olson: McGraw-Hil.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Membangun Aplikasi E-Government*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. 2019. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Schwab, Klaus. 2016. *The Fourth Industrial Revolution*. Cologny: World Economic Forum.
- Wahab, Solichin A. 2008. *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Wijoyo, H., dkk. 2021. *"Sistem Informasi Manajemen"*, Solok: CV Insan Cendekia Mandiri.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Avianto, Bhakti N., dan Nanda Amelia. 2021. "Penerapan E-Government melalui Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (Sintag) di Sekretariat Jenderal MPR RI." *International Journal of Social and Public Administration*, 1(1): 1-12.
- Damanik, Marudur P., dan Erisva H. Purwaningsih. 2017. "E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 21(2): 151 - 164.

- Imran, Hasyim A. 2011. "Fenomena Interkoneksi di Lingkungan Instansi Pelayanan Publik Bidang Informasi dan Dokumentasi Sebuah Tinjauan." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15 (2): 219-236.
- Nugroho, Ari C. 2015. "Interkoneksi dan Pembangunan E-Govt" *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 19(2): 209-224.
<https://doi.org/10.31445/jskm.2015.190206>
- Oktavya, Ayu A. 2015. "Penerapan (Electronic Government) e-Government pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam Pemberian Pelayanan di Kota Bontang." *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(3): 1433-1447.
- Safeena, Rahmat, dan Abdullah Kammani. 2013. "Conceptualization of Electronic Government Adoption.", *International Journal of Managing Information Technology*, 5(1): 13-22.
- Sari, Kusuma D., and Wahyu A. Winarno. 2015. "Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, XI(1): 1-18.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jeam/article/view/1192>
- Nugraha, Joko T. 2018. "E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman)." *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media* 2(1): 32-42.

Internet

<https://oss.go.id/>

<https://djppi.kominfo.go.id/>

<http://repository.unas.ac.id/5854/3/BAB%202%20alfia.pdf>

<https://www.academia.edu/download/34265413/ivan-pengumpulan-analisisdata-kualitatif.pdf>

https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1657/5/141801061_file%205.pdf

f diakses pada 22 Februari 2023, pukul 17.50.

[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79342/235-](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79342/235-246_1.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

[246_1.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79342/235-246_1.pdf?sequence=2&isAllowed=y) diakses pada 21 Januari 2023, pukul 19.50.

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/4-strategi-pemerintah-untuk-menarik-investor-berinvestasi-di-indonesia> diakses pada 22 Januari 2023, pukul 23.00.

Direktorat Statistik Keuangan, Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021, *Indonesia: Badan Pusat Statistik*, 2021, hal. 20. diakses dari <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694e537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html> pada 22 Januari 2023 pukul 21.25.

Ikhsan, “Sejarah Perkembangan Revolusi Industri Era 1.0 sampai 4.0”, *Sasana Digital: Empowering Digital Transformation*, 14 Desember 2022, diakses dari <https://sasanadigital.com/mengintip-perkembangan-revolusi-industri-mulai-era-1-0-sampai-4-0/> pada 20 Januari 2023, pukul 22.00.

Leski Riskinaswara, “*Revolusi Industri 4.0*”, Ditjen Aptika, 28 Januari 2020, diakses dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/> pada 22 Januari 2023 pukul 19.45.

Merdeka, “*Sofyan Djalil Kenang Alotnya Menarik Ditjen Postel ke Kemkominfo*”, 13 Agustus 2021, merdeka.com, diakses dari <https://www.merdeka.com/teknologi/sofyan-djalil-kenang-alotnya-menarik-ditjen-postel-ke-kemkominfo.html> pada 10 Januari 2023 pukul 18.12.

Ted Talks, “*Trust and Design: How Digital Can Save the Future of Government | Jaimie Boyd | TEDxUNBC*”, 28 Maret 2020, YouTube, diakses dari <https://youtu.be/xdRblpqE5Xc> pada 20 Januari 2023 pukul 21.35.

Yeni Ratna, “Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19”, Februari 2022, *KEMENKEU RI*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html> pada 22 Januari 2023 pukul 21.41.

Regulasi dan Peraturan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No. 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.



LAMPIRAN

A. Daftar Pedoman Wawancara

No	Fokus Masalah	Pertanyaan
1	Memperbaiki kualitas pelayanan	Menurut Bapak/Ibu apakah upaya yang dilakukan Direktorat Pos untuk meingkatkan kualitas pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?
		Menurut Bapak/Ibu Apakah penerapan e-government dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan?
2	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dapat diakses dalam tahapan pengajuan perizinan dengan menerapkan <i>e-government</i> dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos melalui OSS sudah jelas?
		Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan e-government dalam perizinan penyelenggaraan pos melalui program OSS tersebut dapat menjamin akuntabilitas pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?
3	Mengurangi total biaya administrasi	Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan <i>e-government</i> dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos dapat mengurangi biaya administrasi?
		Menurut Bapak/Ibu apakah biaya yang dikeluarkan pada penerapan <i>E-Governrment</i> dalam perizinan penyelenggaraan pos berkurang secara signifikan?
4	Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru	Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan <i>E-Government</i> dalam perizinan penyelenggaraan pos mempermudah terjalinnya interaksi antar mitra lembaga dan mitra usaha penyelenggara pos?

		Menurut Bapak/Ibu apakah interkasi yang terjalin secara online dengan adanya penerapan <i>E-Government</i> dalam perizinan penyelenggaraan pos dapat menjadi peluang untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru?
5	Memberdayakan masyarakat	Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang dirasakan dalam proses penerapan <i>E-Government</i> dalam perizinan penyelenggaraan pos?
		Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan penerapan <i>E-Government</i> dalam perizinan penyelenggaraan pos memudahkan pelaku usaha untuk melakukan pengaduan dan saran?
		Menurut Bapak/Ibu apakah aduan dan saran yang diberikan oleh pelaku usaha menjadi evaluasi dalam pelayanan perizinan pos melalui OSS
6	Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru	Menurut Bapak/Ibu apakah sosialisasi penerapan <i>E-Government</i> dalam perizinan penyelenggaraan pos sudah dilaksanakan?
		Menurut Bapak/Ibu apa saja fasilitas layanan pada penerapan <i>E-Government</i> dalam perizinan penyelenggaraan pos untuk menciptakan mitra usaha yang <i>up to date</i> ?

B. Transkrip Wawancara 1

Informan Penelitian	Ketua Tim Kerja Pengelola Tata Usaha Direktorat Pos
	Tjahyadi
Hari / Tanggal	Jumat, 14 Oktober 2022

A = Peneliti

B = Informan

- A : Menurut Bapak/Ibu apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?
- B : Perizinan melalui PTSP memang kan arah presiden supaya izin berusaha untuk masyarakat dibuka seluas luasnya dan kalau bisa dipermudah. Nah, untuk itu di direktorat pos juga melakukan sesuai arahan presiden. Yaitu melakukan perizinan secara online. Memang sebelum ada arahan tersebut perizinan kita baik itu pos, tel dan siar itu manual. Dengan demikian, kita mengganti dengan perizinan secara online. Nah saat ini sudah berjalan izin tersebut secara online. Pada waktu itu, perizinan hanya bisa diajukan secara langsung melalui kantor direktorat pos, tapi kemudian diambil oleh OSS untuk dibentuk layanan satu atap di gedung Kominfo pusat.
- A : Menurut Bapak/Ibu Apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan?
- B : Itu untuk izin direktorat pos, saat ini sangat mudah sekali dibandingkan dengan periznan yang lain, sangat cepat. Jadi sangat membantu untuk proses perizinan yang akan diajukan oleh masyarakat.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dapat diakses dalam tahapan pengajuan perizinan dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen sudah jelas?
- B : Saya harap cukup jelas, ya. Walaupun ada masyarakat yang merasa kurang jelas terkait perizinan sekarang, masyarakat bisa menghubungi kami melalui akun media sosial kita, atau bisa melalui *call center*.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen tersebut dapat menjamin tranparansi dan akuntabilitas pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?
- B : Dikarenakan untuk perizinanya kita melalui satu pintu, yaitu melalui

aplikasi OSS. Jadi informasi bisa didapat secara langsung di sana. Terkait tahapan dari proses perizinan, persyaratan, dan sebagainya. Untuk akuntabilitas pelaksanaan perizinan ini sendiri memiliki dasar hukum, jadi pasti sudah terjamin.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dapat mengurangi biaya administrasi?

B : Untuk biaya operasional ada sedikit berkurang.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah biaya yang dikeluarkan pada penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen berkurang secara signifikan?

B : Untuk biaya yang berkurang tersebut dapat dibilang tidak terlalu signifikan.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen mempermudah terjalinnya interaksi antar mitra lembaga dan mitra usaha penyelenggara pos?

B : Iya, tentu. Kami melakukan interaksi dari berbagai mitra untuk melakukan kerjasama terkait penyelenggaraan pos.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah interaksi yang terjalin secara online dengan adanya penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dapat menjadi peluang untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru?

B : Kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan baru, kami harap ada. Tetapi kami butuh pertimbangan dan kebijakan lebih lanjut dari pihak yang berwenang tentunya.

A : Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan?

B : Sosialisasinya seperti mengadakan workshop, rapat dengan pelaku usaha dan lembaga terkait, dan sebagainya.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen memudahkan pelaku usaha untuk melakukan pengaduan dan saran?

B : Untuk media pengaduan bisa melalui saluran di sosial media kita ada, kemudian di situs Kominfo juga ada. Jadi disitu ada informasinya untuk melakukan aduan lewat telepon dan email.

- A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen aduan dan saran yang diberikan oleh pelaku usaha menjadi evaluasi dalam pelayanan perizinan pos?
- B : Untuk itu sudah menjadi SOP ya, untuk menjadikan aduan dan saran menjadi bahan untuk evaluasi.
- A : Menurut Bapak/Ibu apa saja fasilitas layanan padapenerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen untuk menciptakan mitra usaha yang *up to date*?
- B : Dari workshop kita biasanya berbagi informasi terkait perkembangan apa saja di industri pos, seperti itu.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang dirasakan dalam proses penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?
- B : Biasanya kendala ada pada sistem dan beberapa dari SDM. Kita menangani dengan evaluasi dan perbaikan sistem. Dan untuk SDM sendiri, kita biasanya melakukan pengarahan melalui sosialisasi.



C. Transkrip Wawancara 2

Informan Penelitian	Ketua Tim Kerja Pelayanan Pembinaan Industri Pos dan Kurir Direktorat Pos Chris Polin
Hari / Tanggal	Senin, 12 Desember 2022

A = Peneliti

B = Informan

- A : Menurut Bapak/Ibu apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?
- B : Pada awal 2017 perizinan online penyelenggaraan pos mulai diterbitkan, namun belum terintegrasi. jadi masih sebagai aplikasi internal yang dikembangkan untuk memudahkan Direktorat Pos. Kemudian di 2018 ada PP terbaru, dimana muncul istilah Online Single Submission yang mengharuskan setiap kementerian terintegrasi dengan OSS. Dengan demikian sistem kita terintegrasi dengan OSS, dimana kita menganut prinsipnya itu izin itu diterbitkan terlebih dahulu. Dan dengan diterapkan itu, kita bisa lebih efisien, karena waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin itu jauh lebih sebentar dibanding proses sebelumnya. Yaitu, PTSP, online melalui aplikasi dari kita, dan apalagi manual.
- A : Menurut Bapak/Ibu Apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan?
- B : Kalau berdasarkan proses yang ditempuh dari perizinan manual hingga saat ini, kami harap masyarakat setuju bahwa ada peningkatan pada kualitas layanan di perizinan penyelenggaraan pos ini.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dapat diakses dalam tahapan pengajuan perizinan dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen sudah jelas?
- B : Mudah-mudahan sudah. Karena ini tergantung dari masyarakat itu sendiri, informasi apa yang dibutuhkan terkait perizinan penyelenggaraan pos ini. Yang sebetulnya sudah kami sampaikan di berbagai platform. Tapi kalau memang ada saran atas informasi yang kurang jelas atau sulit dipahami, kami sangat terbuka untuk masyarakat mengajukan hal tersebut melalui media sosial atau call center kami.

- A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen tersebut dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?
- B : Salah satu tujuan diterapkannya perizinan online ini memang untuk bisa menerapkan transparansi dan akuntabilitas kita. Dan memang itu sudah menjadi visi kita. Sebelum adanya sistem online, masyarakat pasti merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait SOP, biaya dan sebagainya. Nah, ketika ada online ini semua informasi dapat diakses melalui satu portal. Sehingga pelaku usaha dapat melihat bagaimana tahapan yang ada. Nah, untuk meminimalisir adanya resiko pencurian private data, itu ada regulasinya.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dapat mengurangi biaya administrasi?
- B : Kalau untuk biaya administrasi, seperti biaya operasional, dokumen dan sebagainya, bisa dibidang itu tidak berkurang ya, melainkan dari pembiayaan tersebut dialihkan untuk pembiayaan peningkatan pelayanan yang ada dari penerapan *e-government* ini.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah biaya yang dikeluarkan pada penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen berkurang secara signifikan?
- B : Bisa dibidang tidak.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen mempermudah terjalinnya interaksi antar mitra lembaga dan mitra usaha penyelenggara pos?
- B : Untuk itu, iya. Kita dapat terhubung biasanya melalui WA, e-mail atau melalui surat elektronik yang sudah terintegrasi dengan mitra kementerian. Dan kalau kita perlu melakukan rapat, tapi antar mitra tidak memungkinkan tatap muka, kita bisa melalui zoom. Karena kita yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pos ini jadi kita perlu saling terhubung satu dengan yang lain, untuk memantau perkembangan dari industri pos ini.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah interaksi yang terjalin secara online dengan adanya penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dapat menjadi peluang untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru?
- B : Untuk pendapatan baru memang memungkinkan, karena tujuan kita memang untuk menarik PNBPN sebanyak-banyaknya, supaya dana bisa digunakan untuk kemajuan industri pos. Salah satunya dengan

optimalisasi penerimaan PNBPN yang sudah ada. Namun, kita perlu bicarakan lebih lanjut kepada para stakeholder dan pihak-pihak yang berkepentingan. Termasuk untuk dirumuskan sebagai dasar hukum. Karena semua itu diperlukan dasar hukumnya, supaya terhindar dari pungutan liar.

- A : Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan?
- B : Untuk sosialisasinya biasanya kita melibatkan mitra usaha dalam FGD (*Focus Group Discussion*), kemudian ada workshop, dan seminar nasioanl.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen memudahkan pelaku usaha untuk melakukan pengaduan dan saran?
- B : Untuk pengaduan dan saran masyarakat bisa mengakses melalui aplikasi kita di SIPPPDihati dan caranya sangat mudah.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen aduan dan saran yang diberikan oleh pelaku usaha menjadi evaluasi dalam pelayanan perizinan pos?
- B : Iya, betul sekali. Karena memang pelayanan tadi dimaksudkan untuk masyarakat, jadi aduan yang masuk kita jadikan pertimbangan dan juga untuk kita diskusikan bersama ahli, lembaga terkait, dan pelaku usaha.
- A : Menurut Bapak/Ibu apa saja fasilitas layanan padapenerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen untuk menciptakan mitra usaha yang *up to date*?
- B : Kendala pasti banyak, apalagi kita menggunakan sistem online dimana dikerjakan melalui sistem yang dioperasikan. Seperti kendala sistem, kendala SDM untuk dibangun *capacity buildingnya* dan *upgrading* pegawai PTSP supaya mengerti regulasi kita. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita memitigasi resiko dari kendala yang ada itu.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang dirasakan dalam proses penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?
- B : Dari adanya workshop, kita melakukan sharing tentang industri pos. Kita sharing berbagai kendala, serta mitigasi kendalanya. Selain itu, dari workshop tadi kita juga ada siaran berita yang bisa diakses melalui website resmi dari Kominfo, Ditjen PPI, dan juga media sosial kami

biasanya. Dari siaran berita tersebut, beritanya dapat diketahui oleh mitra usaha yang tidak dapat menghadiri workshop kami.



D. Transkrip Wawancara 3

Informan Penelitian	Aparatur Tim Kerja Pelayanan Pembinaan Industri Pos dan Kurir Direktorat Pos
	Rivan
Hari / Tanggal	Senin, 12 Desember 2022

A = Peneliti

B = Informan

- A : Menurut Bapak/Ibu apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?
- B : Untuk izin penyelenggaraan pos dari Direktorat Pos dimulai dengan izin manual, lalu kita rubah menjadi online, kemudian kita rubah menjadi terintegrasi, sampai akhir sampai saat ini dengan menerapkan OSS, begitu. Jadi pada awalnya izin itu masih dalam bentuk berkas. Jadi penyelenggara pos datang ke kita, mengantarkan berkasnya, kemudian nanti penyelenggara pos pulang lagi. Lalu si verifikator, harus mengerjakan. Nah, biasanya untuk peraturan kita dulu, peraturan kita dulu yang pertama itu di PM 32 Tahun 2014. Di PM itu tentang tata cara dan penyelenggaraan pos, disitu durasi waktunya selama 10 sampai 14 hari kerja. Nah jadi, pemohon datang ke loket manual membawa berkas untuk diberikan ke kita kemudian kita data, setelah itu dia pulang. Lalu berdasarkan SOP tadi yang selama 10-14 hari kerja, dari situ si verifikator harus membuat hasil verifikasinya. Lalu membuat SK izinnya secara manual kemudian diprint beserta hasil verifikasinya. Kemudian masuk lagi berjenjang untuk diparaf mulai dari Aselon IV, Aselon III, sampai nanti tanda tangan itu adalah Pak Dirjen sebelum adanya *e-licensing*. Kemudian jika berkas sudah oke sampai ke Pak Direktur. kemudian masuk ke bagian hukum, dibagian hukum itu dilihat legal drafting SKnya. Kalau dia SKnya itu sudah oke, baru bisa ditanda tangan Pak Dirjen. Dan itu bisa berbulan-bulan baru selesai. Dikarenakan itulah, kita punya inisiasi untuk merubah pelayanan kita reformasi melalui online.
- A : Menurut Bapak/Ibu Apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan?
- B : Pada proses perizinan manual waktu itu tidak pasti, jadi bisa sebulan atau lebih dari SOP walaupun sudah ditetapkan, tetapi pasti lebih dari SOP karena membutuhkan tanda tangan Pak Dirjen dan Pak Menteri yang kesibukannya tidak bisa kita atur. Sehingga otomatis kemungkinan

surat izin keluar bisa satu sampai dua bulan. Saat menerapkan online kita dituntut harus kerja kapan saja dan dimana saja, dan itu prosesnya dari manual yang seharusnya 14 hari, di tahun 2017 kita rubah menjadi 10 hari 2018 kita rubah menjadi 5 hari dan dari 2019 hingga hari ini menggunakan same day service, jadi harus di hari itu juga kita kerjakan dan harus keluar SKnya. Terkait dengan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan, *alhamdulillah*, kita sudah dua kali mendapat penghargaan. Pertama dari aplikasi kita SIPPPDIHATI itu masuk di Top 99 inovasi versi MENPARRB. Trus dua kali sebagai penghargaan role model pelayanan publik dari MENPAN RB, dari tahun pertamanya mendapatkan penilaian A- dan ditahun kedua mendapatkan penilaian A+, selama dua tahun berturut-urut. Terus yang terkahir di tahun 2021 kita itu mendapatkan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan itu salah satu parameternya dinilai dari terdapat integritasnya dari pelayanan kita dan berapa transparanya juga pelayanan kita yang dimana kita sudah menggunakan sistem e-licensing tadi.

- A : Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dapat diakses dalam tahapan pengajuan perizinan dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen sudah jelas?
- B : Untuk tahapanya bisa diakses di web OSSnya secara langsung. Dan jika kurang jelas, pemohon bisa langsung menghubungi kami melalui call center 159 dan juga melalui media sosial.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen tersebut dapat menjamin tranparansi dan akuntabilitas pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?
- B : Dengan adanya penerapan *e-government* pada periznan ini tentunya lebih memberi kepastian ke pelaku usahanya. Karena yang awalnya pemohon tidak bisa tracking, ya. Nah, sekarang bisa tracking permohonan yang diajukan. Jadi lebih transparan, dan lebih terbuka. Mereka bisa lihat tracking permohonanya itu secara real time. Dan untuk melindungi data pribadi itu sudah ada dasar hukumnya yaitu melalui UU ITE, Peraturan Pemerintah dan Peratuan Menteri Kominfo juga ada.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dapat mengurangi biaya administrasi?
- B : Saat manual dulu, kita membuka loket dan ada kegiatan coaching clinic dan mendatangi daerah-daerah. Dan sejak penerapan secara online, kemudian melalui OSS kita sudah tidak memerlukan itu. Sehingga dari segi ini, total biaya pengeluaran memang berkurang.

Dari segi anggaran dapat dibilang tidak mengurangi total biaya pengeluaran, karena itu akan menimbulkan pembiayaan baru. Hanya yang bisa dilihat itu bagaimana pembiayaan yang muncul dampaknya sangat signifikan. Karena sebenarnya kita berorientasi bahwa anggaran yang diberikan harus memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Dampak yang luas ini harus bisa dirasaka.

- A : Menurut Bapak/Ibu apakah biaya yang dikeluarkan pada penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen berkurang secara signifikan?
- B : Karena yang berkurang tadi hanya pengeluaran yang secara operasional, jadi tidak terlalu signifikan pengeluarannya. Malah dapat dibilang, kalau secara anggaran lebih besar, karena pembaharuan melalui teknologi tentunya memerlukan anggaran lebih untuk teknologi yang digunakan dan juga sumber daya manusianya.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen mempermudah terjalinya interaksi antar mitra lembaga dan mitra usaha penyelenggara pos?
- B : Betul, karena memang adanya elektornik berguna untuk memperluas jaringan. Sehingga interaksi antar mitra lembaga dan mitra usaha terjalin dengan mudah.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah interkasi yang terjalin secara online dengan adanya penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dapat menjadi peluang untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru?
- B : Untuk sumber pendapatan baru sebetulnya bisa kita cari ya. Tapi berdasarkan arahan presiden, bahwa harus membuat proses perizinan dengan sangat mudah dan tidak dibebankan kepada negara. Sehingga dengan ada itu, akan bertolak belakang apabila kita mencari sumber-sumber pendapatan lain dibidang perizinan. Hanya saja ada beberapa pertimbangan yang harus dikaji, tidak hanya dari kita tetapi juga dari kementerian keuangan, tentang bagaimana mereka mencari potensi pendapatan baru tadi. Tetapi kalau misalkan dibidang perizinan dan itu masuk di ranah PNBPN itu kemungkinan adanya pendapatan baru itu sangat kecil. Lantaran berdasarkan data kami presentase badan usaha bidang penyelenggara pos ini 60-80% merupakan pelaku usaha UMKM. Dan sisanya baru partai besar seperti Gojek, Grab, Maxim, Lalamove, Excel.
- A : Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan?

- B : Memberdayakan mitra usaha dalam mengambil kebijakan biasanya mitra usaha dilibatkan dalam FGD, sharing knowledge, atau workshop, dan seminar nasional. Biasanya dalam seminar nasional mitra usaha bisa sharing.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen memudahkan pelaku usaha untuk melakukan pengaduan dan saran?
- B : Untuk pengaduan dan saran masyarakat bisa mengisi survey melalui e-survey yang kami bagikan di aplikasi kami, yaitu aplikasi SIPPPDihati. Jadi sangat mudah dan bisa dijangkau dimana saja oleh pelaku usaha.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen aduan dan saran yang diberikan oleh pelaku usaha menjadi evaluasi dalam pelayanan perizinan pos?
- B : Terkait dengan kebijakan tersebut biasanya kita minta ke asosiasi yang bernama Asperindo, biasanya terkait dengan peraturan itu kita konsultasi kepada Asperindo atau uji publik. Uji publik ini yang nantinya penyelenggara pos bisa melihat apakah kebijakannya sudah sesuai di lapangan atau belum.
- A : Menurut Bapak/Ibu apa saja fasilitas layanan padapenerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen untuk menciptakan mitra usaha yang *up to date*?
- B : Sebetulnya untuk permasalahan dalam penerapan e-government ini, saya lebih menyorot ke e-licensingnya. Kendala yang dihadapi biasanya seperti serangan cyber, pencurian data pribadi, akses illegal. Hal-hal tersebut memang yang menjadi kekhawatiran kita. Di setiap sistem yang mana sudah menjadi bagian dari sop adalah harus memitigasikan risikonya. Untuk memitigasi resiko tersebut dengan mengklarifikasi tingkat kendala mulai dari kecil atau ringan, dan sangat berat. Biasanya yang menjadi kategori sangat berat itu seperti yang dijelaskan tadi seperti serangan-serangan cyber, pencurian data pribadi, dan akses ilegal. Untuk tingkat kendala ringan/kecil itu contohnya seperti lebih ke server down. Untuk saat ini dari tahun 2017-2020 untuk memitigasi kendala itu kita menggunakan server telkom sigma yang terdiri dari dua server yang ditempatkan di bintaro dan di batam. Jadi, jika salah satu server down, atau kabel fiber optiknya putus. Jadi kita masih punya cadangan di server yang satunya. Nah, untuk mitigasi 2022 ini servernya melalui PDSI yaitu dari Pusat Data Sarana dan Informatika di Kominfo, sehingga servernya itu berada dan dikelola oleh Kominfo dan menjadi tanggung jawab kita.

- A : Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang dirasakan dalam proses penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?
- B : Untuk menciptakan mitra usaha yang *up to date* kita melakukan *sharing knowledge*. Jadi kita mengundang agent-agent untuk kita upgrade skill dan pengetahuan mereka terkait dengan peraturan dan proses terbaru terkait percepatan perubahan pada perizinan penyelenggaraan pos.



E. Transkrip Wawancara 4

Informan Penelitian	Karyawan PT Nusantara Sukses Gemilang Hendry
Hari / Tanggal	Selasa, 3 Januari 2023

A = Peneliti

B = Informan

A : Menurut Bapak/Ibu apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?

B : Karena dia sekarang sudah online, sudah memudahkan, ya.

A : Menurut Bapak/Ibu Apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan?

B : Seharusnya memang ada ya. Sekarang jangka waktunya untuk perizinan penyelenggaraan pos yaitu selama perusahaan ini berdiri. Sedangkan dulu, perlu diperbarui setiap 5 tahun.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dapat diakses dalam tahapan pengajuan perizinan dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen sudah jelas?

B : Cukup jelas sampai sekarang, ya.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen tersebut dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?

B : Karena bisa diakses tahapanya melalui aplikasi OSS, jadi saya merasa sudah cukup terjamin.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dapat mengurangi biaya administrasi?

B : Untuk pembiayaan yang dikurang seperti biaya untuk ke sananya saja, jadi biaya operasionalnya cukup berkurang.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah biaya yang dikeluarkan pada penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen berkurang secara signifikan?

B : Tapi tidak berkurang terlalu signifikan.

- A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen mempermudah terjalinnya interaksi antar mitra lembaga dan mitra usaha penyelenggara pos?
- B : Cukup mudah, karena biasanya ada acara workshop. Jadi bisa bertukar pikiran.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah interaksi yang terjalin secara online dengan adanya penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dapat menjadi peluang untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru?
- B : Untuk menambah kerja sama, kemungkinan memang ada. Tapi itu tergantung perusahaan, ingin menambah pendapatan lain atau tidaknya.
- A : Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan?
- B : Pada saat awal diterapkannya saya rasa belum tersosialisasikan dengan baik. Tapi untuk sekarang memang sudah berjalan dengan baik.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen memudahkan pelaku usaha untuk melakukan pengaduan dan saran?
- B : Untuk hal itu, saya belum pernah. Tapi karena ada platform yang disediakan, harusnya memudahkan.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen aduan dan saran yang diberikan oleh pelaku usaha menjadi evaluasi dalam pelayanan perizinan pos?
- B : Sepertinya iya.
- A : Menurut Bapak/Ibu apa saja fasilitas layanan padapenerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen untuk menciptakan mitra usaha yang *up to date*?
- B : Sejauh ini tidak ada kendala.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang dirasakan dalam proses penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?
- B : Biasanya untuk mengetahui berita terkini tentang pos, atau berita

tentang perkembangan pos ini. Saya melihat berita dari website resmi Kominfo, atau media sosial Ditjen PPI.



F. Transkrip Wawancara 5

Informan	Karyawan PT Krida Jaringan Nusantara
Penelitian	Sofyan A
Hari / Tanggal	Kamis, 12 Januari 2023

A = Peneliti

B = Informan

A : Menurut Bapak/Ibu apakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?

B : Sebelumnya kami perlu ke kantor Direktorat Pos untuk permohonan izin. Dan sekarang hanya dengan mengakses aplikasi OSS, kan. Itu lebih efisien.

A : Menurut Bapak/Ibu Apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen saat ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan?

B : Meningkat memang. Karena sebelumnya perizinan bisa sampai sebulan pada saat manual. Tapi sekarang, kalau tidak salah tidak sampai dua hari.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah informasi yang dapat diakses dalam tahapan pengajuan perizinan dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen sudah jelas?

B : Sudah, sudah jelas.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen tersebut dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas pelayanan perizinan penyelenggaraan pos?

B : Cukup transparan, ya. Waktu itu saya mencari peraturan baru itu, saya tinggal mengakses aplikasi yang sekarang (OSS), dan untuk tahapanya juga bisa langsung diakses di tempat yang sama juga.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dapat mengurangi biaya administrasi?

B : Paling hanya berkurang biaya operasionalnya saja ya.

A : Menurut Bapak/Ibu apakah biaya yang dikeluarkan pada penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk

- pencapaian Sistem Informasi Manajemen berkurang secara signifikan?
- B : Tidak terlalu kelihatan, sih, berkurangnya.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen mempermudah terjalinya interaksi antar mitra lembaga dan mitra usaha penyelenggara pos?
- B : Dari adanya media yang disediakan dan teknologi yang mendukung, sangat mudah memang bagi penyelenggara pos berinteraksi. Biasanya melalui pertemuan zoom, atau media sosial. Dan kalau ada acara seminar, seperti itu.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah interaksi yang terjalin secara online dengan adanya penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dapat menjadi peluang untuk bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru?
- B : Memungkin saja, tergantung dari perusahaannya sendiri.
- A : Menurut Bapak/Ibu bagaimana sosialisasi penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan?
- B : Cukup baik saya rasa.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen memudahkan pelaku usaha untuk melakukan pengaduan dan saran?
- B : Mungkin, ya. Setau saya bisa lewat media sosialnya.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah dengan penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen aduan dan saran yang diberikan oleh pelaku usaha menjadi evaluasi dalam pelayanan perizinan pos?
- B : Sepertinya iya.
- A : Menurut Bapak/Ibu apa saja fasilitas layanan padapenerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen untuk menciptakan mitra usaha yang *up to date*?
- B : Sampai saat ini tidak ada.
- A : Menurut Bapak/Ibu apakah ada kendala yang dirasakan dalam proses penerapan *e-government* dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan pos untuk pencapaian Sistem Informasi Manajemen?
- B : Melalui media sosial ya pastinya, dan website yang ada untuk mengajukan pengaduan.

DOKUMENTASI



Foto Bersama Ketua Tim Kerja Pengelola Tata Usaha Direktorat Pos



Foto Bersama Aparatur Tim Kerja Pelayanan Pembinaan Industri Pos dan Kurir Direktorat Pos

Surat Izin Penelitian kepada Penyelenggara Pos



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 1337/WD/MI/2022 Jakarta, 01 Desember 2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pemimpin PT Nusantara Sukses Gemilang
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Nabila Yustina Azzahra
Nomor Induk Mahasiswa	: 193515516167
Prodi/Konsentrasi	: Administrasi Publik
Alamat Rumah	: Jl. Masjid Darussalam No. 21 RT 14/ RW 11, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
HP	: 085771674740

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : *"Penerapan E-Government dalam Perizinan Penyelenggaraan Pos untuk Pencapaian Sistem Informasi Manajemen pada (Direktorat Pos, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat)"*, dengan Dosen Pembimbing : Dr. Mary Ismowati M.Si. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hendry
Hendry
021-6330866

Wakil Dekan
Bhakti Nur Avianto
Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : *AS/WD/XII/2022* Jakarta, 01 Desember 2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pemimpin PT Krida Jaringan Nusantara
Di -

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Nabila Yustina Azzahra
Nomor Induk Mahasiswa	: 193515516167
Prodi/Konsentrasi	: Administrasi Publik
Alamat Rumah	: Jl. Masjid Darussalam No. 21 RT 14/ RW 11, Kel. Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
HP	: 085771674740

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : *"Penerapan E-Government dalam Perizinan Penyelenggaraan Pos untuk Pencapaian Sistem Informasi Manajemen pada (Direktorat Pos, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat)"*, dengan Dosen Pembimbing : Dr. Mary Ismowati M.Si. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Sofyan . A

Wakil Dekan,
Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

021 3190 5050
0895 3248 03556

Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik- Ilmu Komunikasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nabila Yustina Azzahra
NPM : 193515516167
Tempat/Tgl. Lahir : Ponorogo, 18 Januari 2001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Telp : 085771674740
Alamat : Jl Masjid Darussalam No. 21 RT 14/ RW 11 Kel.
Kedaung, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
Email : nabilayustina@gmail.com

Pendidikan Formal

- (2007 - 2013) SDN Ciputat 4
- (2013 - 2016) SMP Negeri 6 Tangerang Selatan
- (2016 – 2019) SMK Nusantara 1 Ciputat Timur



BAB 1-5 Revisi 2

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

15%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	2%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
3	jia.stialanbandung.ac.id Internet Source	2%
4	mkn.usu.ac.id Internet Source	1%
5	web.kominfo.go.id Internet Source	1%
6	jdih.kominfo.go.id Internet Source	1%
7	repository.unismabekasi.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%



10	ejurnal.balitbangda.kukarkab.go.id Internet Source	<1 %
11	research-report.umm.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
13	adoc.pub Internet Source	<1 %
14	repository.moestopo.ac.id Internet Source	<1 %
15	ppidkemkominfo.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.slideserve.com Internet Source	<1 %
18	repository.usahid.ac.id Internet Source	<1 %
19	zenodo.org Internet Source	<1 %
20	123dok.com Internet Source	<1 %
21	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %



22	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Northwest Missouri State University Student Paper	<1 %
24	dpmptsp.bulelengkab.go.id Internet Source	<1 %
25	www.maulana48.blogstudent.mb.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
27	core.ac.uk Internet Source	<1 %
28	eprints2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to University of the Philippines - Manila Student Paper	<1 %
30	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %



33	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
34	www.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
35	ejournal.upbatam.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
37	rb.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
38	anyflip.com Internet Source	<1 %
39	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
40	fkipuntad.com Internet Source	<1 %
41	www.bareksa.com Internet Source	<1 %
42	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
43	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
44	achmadruandi.blogspot.com Internet Source	<1 %



45	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
46	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
47	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	<1 %
48	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
49	fitria.blog.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1 %
50	okeekristian.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	portal.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
52	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
53	jurnal.una.ac.id Internet Source	<1 %
54	kominfo.go.id Internet Source	<1 %
55	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
56	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %



57	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
58	dianapvt.blog.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1 %
59	materi-itumc.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	<1 %
61	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
62	repository.unas.ac.id Internet Source	<1 %
63	sdppi.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
64	adminjdih.kominfo.go.id Internet Source	<1 %
65	eriyanto321.blogspot.com Internet Source	<1 %
66	www.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
67	www.umn.ac.id Internet Source	<1 %
68	Submitted to Yayasan Vitka	



Student Paper

<1 %

69 ejournal.unsrat.ac.id
Internet Source

<1 %

70 www.coursehero.com
Internet Source

<1 %

71 www.researchgate.net
Internet Source

<1 %

72 dpmptsp.pekalongankota.go.id
Internet Source

<1 %

73 eprints.upnyk.ac.id
Internet Source

<1 %

74 repository.upi.edu
Internet Source



<1 %

75 www.scribd.com
Internet Source

<1 %

76 Submitted to Universitas Amikom
Student Paper

<1 %

77 Submitted to Universitas Cendrawasih
Student Paper

<1 %

78 dpmptsp.jambiprov.go.id
Internet Source

<1 %

79 eprints.uny.ac.id
Internet Source

<1 %

80	ernawatipaud.blogspot.com Internet Source	<1 %
81	greenpermit.id Internet Source	<1 %
82	irsyadddd.blogspot.com Internet Source	<1 %
83	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
84	lppm.uim.ac.id Internet Source	<1 %
85	repository.pnb.ac.id Internet Source	<1 %
86	Submitted to Republic of the Maldives Student Paper	<1 %
87	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	<1 %
88	kbr.id Internet Source	<1 %
89	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	<1 %
90	widuri.raharja.info Internet Source	<1 %
91	indah20.wordpress.com Internet Source	<1 %



92 scientia.id
Internet Source <1 %

93 www.kompasiana.com
Internet Source <1 %

94 Didik Sasono Setyadi, Mailinda Eka Yuniza.
"PERIZINAN BERUSAHA DI SEKTOR HULU
MINYAK DAN GAS BUMI: EVALUASI SISTEM
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK", Jurnal
Ius Constituendum, 2021
Publication <1 %

95 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya
Student Paper <1 %

96 eprints.ipdn.ac.id
Internet Source <1 %

97 eprints.walisongo.ac.id
Internet Source <1 %

98 m.merdeka.com
Internet Source <1 %

99 republika.co.id
Internet Source <1 %

100 www.ksi-indonesia.org
Internet Source <1 %

